**Kebijakan Luar Negeri RI Era SBY 2004 – 2014:**

1. Isu atau tema penting KLN RI Era SBY:
   1. Ciri utama kebijakan luar negeri era SBY adalah membangun citra baru Indonesia (kontras dengan Orde Baru dan ancaman disintegrasi mengarah ke *failed state* pada masa transisi) di lingkungan internasional sebagai demokrasi yang stabil dan *emerging market* yang berpotensi tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan. Selain itu dikembangkan juga citra Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dan mampu menunjukkan kepada dunia tentang *compatibility* antara Islam dan demokrasi sebagai kontras terhadap ketidakpastian dan kekacauan gerakan demokrasi *Arab Spring* di Timur Tengah.
   2. Awal konsolidasi demokrasi Indonesia dengan berhasilnya pemilihan presiden secara langsung yang mengantar SBY menjadi presiden ke 7 RI. Bagaimana signifikansi konsolidasi demokrasi terhadap kebijakan luar negeri Indonesia?
   3. Mulai terbangunnya *blueprint* sistem politik Indonesia yang demokratis yang intinya adalah sistem presidensial berbasis multi-partai (*multi-party based presidential system*) sebagai kerangka politik untuk menata dan mengelola keragaman suku, agama dan etnis rakyat Indonesia. Cetak biru politik ini penting sebagai basis identitas Indonesia sebagai negara demokrasi baru yang stabil di Asia Tenggara.
   4. Tinjauan kritis tentang motto “*million friends and zero enemies*” dalam kebijakan luar negeri RI. Adakah kategori selain “*friends*” dan “*enemies*” dalam kebijakan luar negeri RI?
   5. Strategi globalisasi SBY dan masalah “*good governance*” di dalam negeri
   6. Tesis Amitav Acharya tentang keberhasilan Indonesia di bawah SBY mengkombinasikan *Democracy, Development and Stability* (Amitav Acharya, 2014).
   7. Keberhasilan reformasi TNI dan penghapusan embargo senjata oleh AS
   8. Catatan pelanggaran HAM kaum minoritas selama pemerintahan SBY
   9. Beberapa pencapaian (*achievements*) dalam kebijakan luar negeri SBY
   10. Perhatian SBY terhadap ASEAN sebagai *regional platform* (ASEAN) kebijakan luar negeri RI menghadapi negara-negara besar
2. Pemerintah SBY merupakan awal konsolidasi demokrasi Indonesia yang dicirikan oleh tingkat partisipasi yang tinggi dalam pemilihan legislative maupun pemilihan presiden secara langsung (2004 dan 2009) yang menunjukkan akseptabilitas demokrasi sebagai mekanisme suksesi kekuasaan secara damai dan elegan melalui kontestasi elektoral, reformasi TNI yang menjunjung supremasi sipil, kebebasan pers, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan keterbukaan Indonesia terhadap pasar global, otonomi daerah yang semakin nyata dan penegakan hukum yang mulai berjalan tanpa campur tangan eksekutif. Era SBY merupakan awal pembentukan identitas kebijakan luar negeri Indonesia sebagai negara demokrasi baru dengan penduduk Muslim terbesar di dunia yang berhasil menunjukkan *compatibility* antara Islam dan demokrasi tengah kegagalan *Arab Spring* di Timur Tengah. Keberhasilan konsolidasi demokrasi ini membuka jalan bagi penyelesaian konflik di Aceh secara damai melalui mediasi NGO internasional dan menjadi salah satu *best practice* bagi penyelesaian konflik separatis di bagian dunia yang lain. Pada tanggal 15 Agustus 2005 ditandatangani *Helsinki Agreement* antara Pemerintah Indonesia dengan GAM yang dimediasi oleh *The Crisis Management Initiative* (CMI) yang diwakili oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari.
3. Dalam kebijakan luar negerinya SBY memperkenalkan motto *million friends and zero enemies*. Ditinjau secara kritis motto ini cenderung menyederhanakan lingkungan internasional dengan menggunakan *simple categories*: sahabat dan musuh. Kenyataannya Indonesia pembuatan kategori yang lebih indikatif sebagai pedoman untuk pencapaian tujuan kebijakan luar negeri dalam berbagai bidang. Misalnya, Indonesia perlu mengenali lingkungan eksternal di Asia Tenggara dengan mengidentifikasi negara mana saja yang menjadi competitor dalam hal ekspor komoditas andalan Indonesia dan negara mana yang diajak kerja sama. Tidak semua negara sahabat Indonesia penting, ada negara-negara tertentu yang harus diprioritaskan sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Dengan demikian motto tersebut merupakan simplifikasi berlebihan terhadap lingkungan internasional yang sangat kompleks dan berubah dengan cepat.
4. Menghadapi arus demokratisasi dan globalisasi Indonesia telah memilih sistem presidensial berbasis banyak partai (*multi-party presidential system*) sebagai cetak biru politik atau *political blueprint* masa depannya untuk menjamin sinergi 3 agenda penting (Amitav Acharya. *Indonesia Matters: Asia’s Emerging Democratic Power*. Singapore: World Scientific. 2014). Menurut Amitav Acharya, SBY berhasil mengkombinasikan ketiga agenda berikut:
   1. *Democracy:* pembentukan dan pengorganisasian kekuasaan yang partisipatoris dan akuntabel
   2. *Development:* peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat
   3. *Stability:* pengelolaan kemajemukan atau kebhinekaan bangsa dan manajemen konflik sehingga tercipta stabilitas dan keamanan nasional
5. Komentar kritis motto *million friends and zero enemies*: dalam konteks hubungan internasional yang dicirikan oleh interdependensi dan kompetisi regional dan global motto terlalu menyederhanakan realitas lingkungan internasional dengan membatasi *counterpart* Indonesia pada dua kategori yaitu sahabat dan musuh. Penyederhanaan dan pembatasan kategori ini tidak membantu menyelesaikan masalah Indonesia di lingkungan eksternal dan tidak membawa efek fasilitasi pencapaian tujuan kebijakan luar negeri secara konkrit. Dibutuhkan pengkategorian yang lebih substantive dan terkait kepentingan nasional Indonesia. Misalnya, di kalangan ASEAN memang semua negara adalah sahabat tetapi ada yang jelas-jelas menjadi kompetitor Indonesia, ada mitra sejajar dengan hubungan yang saling menguntungkan tetapi ada juga mitra yang lebih banyak mengambil keuntungan dari Indonesia. Ada juga negara yang harus diberikan beberapa kategori secara simultan (sahabat, *competitor*, dan mitra tidak sejajar seperti China). *Overlapping categories* yang dikenakan pada suatu negara tersebut membawa implikasi penting pada perumusan kebijakan luar negeri yang sesuai dan tepat sasaran demi pencapaian kepentingan nasional.
6. Pembentukan identitas baru kebijakan luar negeri Indonesia sebagai demokrasi yang relative stabil terkonsolidasi, *emerging market* dan kekuatan moderat bisa dilihat dari indikator berikut:
   1. Penghapusan embargo senjata oleh AS dan pemulihan hubungan *military to military* dengan AS.
   2. Keanggotaan dalam G 20
   3. Kerja sama MIKTA (Mexico, Indonesia, Korea, Turkey and Australia) sebagai sesama *constructive powers* di wilayah atau region masing-masing
   4. Keberlanjutan *Bali Democracy Forum* (BDF) sebagai arena promosi demokrasi meskipun kemajuan demokrasi lebih merupakan hasil dari keingingan atau hasrat internal rakyat setiap negara.
   5. Pengakuan dunia internasional tentang Indonesia sebagai kekuatan demokrasi dan *moderate Islam* (dari Barrack Obama dan Hillary Clinton serta para pemimpin di Uni Eropa).
   6. Pemantapan kepemimpin tradisional Indonesia di ASEAN demi stabilitas regional dan prinsip *ASEAN centrality* dalam menghadapi *great powers* (AS, China dan India) dan kepentingan strategis mereka di Asia Tenggara.
7. Strategi globalisasi SBY untuk memperkenalkan identitas baru kebijakan luar negeri RI menghadapi kendala di tingkat domestik dan internasional:
   1. Tingkat korupsi di kalangan partai politik termasuk Partai Demokrat pimpinan beliau sendiri
   2. Pelanggaran HAM kelompok minoritas khususnya kelompok Ahmadiyah dan pembakaran rumah ibadah
   3. Krisis ekonomi 2008
   4. Gaya kepemimpinan yang lebih digerakkan oleh *image-making* dan bukan *problem-solving oriented*.